POHON KINERJA KECAMATAN KLAMBU TAHUN 2025-2029

SASARAN PEMDA :
Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas

INDIKATOR :
NILAI IKM PEMDA KAB GROBOGAN
INDEKS INOVASI DAERAH (SANGAT INOVATIF)

Tujuan Renstra Perangkat Daerah :
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang inovatif dan modern

Indikator Tujuan :
Nilai IKM Kecamatan Wirosari
2025 - B (84,10)
2026 - B (84,13)
2027 - B (84,16)
2028 - B (84, 19)
2029 - B (84,22)
2030 - B (84,25)

SASARAN KECAMATAN KLAMBU:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indikator 1:
Nilai Sakip
2025 - 66,63
2026 - 67,63
2027 - 68,93
2028 - 70,43
2029 - 72,13
2030 - 74,03

Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat

Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap

Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Meningkatnya Lembaga Masyarakat Desa yang aktif

Persentase lembaga masyarakat aktif

Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan

- Meningkatnya Kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan

Persentase Linmas (kecamatan dan desa) Aktif

Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Terwujudnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Terwujudnya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Meningkatnya desa berstatus mandiri di tingkat kecamatan

Persentase desa dengan tertib administrasi

Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya Kualitas Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Derah

- Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Tersedianya Penyediaan Bahan Material
- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Meningkatnya Kualitas Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- Tersedianya unit Peralatan dan Mesin Lainnya
- Tersedianya Aset Tetap Lainnya
- Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Terlaksananya penyediaan Jasa Surat menyurat
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan